

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026



RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-23
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	II-25
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	II-27
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadu Tanggung jawab Perangkat Daerah	II-28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-29
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-29
2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah	II-33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-2
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-5
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN KINRJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-53
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-53
4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-55
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok Menurut Jenis Kelamin	II-16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok Menurut Pendidikan	II-16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok Menurut Jabatan	II-16
Tabel 2.4	Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok	II-17
Tabel 2.5	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Keuangan Daerah Kota Solok	II-19
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2020 - 2024	II-22
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan dalam Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok	II-30
Tabel 2.8	Pemetaan Isu Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok	II-34
Tabel 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Keuangan Daerah	III-7
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	IV-23
Tabel 4.3	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-50
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	IV-54
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	IV-56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok	II-3
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Pemerintah Kota Solok yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun periode perencanaan pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal organisasi. Renstra selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di Lingkungan Badan Keuangan Daerah juga menunjukan tugas, fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Solok pada periode pemerintahan tahun 2025 - 2029 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Solok No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Renstra ini juga berdasarkan pada amanat Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh Lembaga audit internal maupun eksternal.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam pengelolaan keuangan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok untuk kurun waktu 2025-2029, maka perlu disusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif pendanaan, sebagai penjabaran RPJMD secara sistematis dan indikatif.

Renstra Badan Keuangan Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pengelolaan

keuangan daerah dan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat maupun daerah yang diukur melalui indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam kurun waktu lima tahun kebelakang belum mendapatkan capaian nilai yang optimal sesuai yang diharapkan.

Untuk mengoptimalkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk dalam kurun lima tahun kedepan perlu menyusun Renstra Badan Keuangan Daerah yang dapat memetakan permasalahan pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan solusi kearah perbaikan yang tepat sebagai penguatan kebijakan indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berkoorfinasi lintas perangkat daerah dan sinergi program masih perlu diperkuat agar target-target strategis lebih realistis dan terukur.

Selain itu, penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan perekonomian Kota Solok sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Badan Keuangan Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun sebagai amanat regulasi dengan mengedepankan nilai strategis berupa konsistensi, akuntabilitas, partisipasi, inovasi, dan sinergi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewajiban perangkat daerah menyusun Renstra sebagai penjabaran RPJMD dan dasar penyusunan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra dan Renja PD mengatur tahapan, substansi minimal, dan mekanisme verifikasi oleh Bapperida. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029 menegaskan kesinambungan perencanaan lima tahunan dan sinkronisasi renstra PD dengan RPJMD dan RPJPN.

Nilai strategis Renstra Badan Keuangan Daerah mencakup:

1. **Konsistensi dan Kesinambungan** menjamin keselarasan program dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Solok dengan visi, misi, dan target RPJMD Kota Solok.
2. **Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja** menjadi tolok ukur dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan evaluasi capaian kinerja tahunan melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur.
3. **Partisipasi dan Inklusivitas** mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan strategi dan program, sehingga rancangan Renstra lebih responsif dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. **Inovasi dan Adaptabilitas** mendorong pengembangan solusi digital baru serta adaptasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pengelolaan keuangan daerah.

5. **Sinergi dan Terpadu** mewujudkan koordinasi lintas perangkat daerah dan stakeholders dalam pelaksanaan program, agar sumber daya lebih optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025 – 2045;
24. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai pedoman perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah selama 5 tahun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok tahun 2025 - 2029. Sehingga program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok setiap tahun dalam periode 2025 - 2029 terlaksana secara optimal.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. **Mengidentifikasi dan menganalisis capaian kinerja:** mengkaji keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah dalam mencapai target indikator pembangunan sebagaimana yang ditetapkan pada RPJMD Kota Solom Tahun 2025 – 2029, serta mengidentifikasi isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja Badan Keuangan Daerah baik triwulan, tahunan dan jangka menengah.

- 2. **Mengakomodir visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah:** menjamin keselarasan antara program Badan Keuangan Daerah dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sehingga setiap kegiatan mendukung pencapaian target RPJMD.
- 3. **Memberikan fondasi bagi Renja tahunan:** menjadi pedoman strategis dan teknis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah setiap tahun dalam periode 2025 - 2029, agar alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan terarah dan terukur.
- 4. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi:** menyusun kerangka kerja yang memudahkan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025 - 2029 sesuai Inmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, serta isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam periode Tahun 2025- 2029;

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi perumusan dan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah dalam lima tahun mendatang serta target kinerja untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, sedangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur fungsi pemerintahan dibidang keuangan.

Badan Keuangan Daerah di pimpin oleh Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah disamping bertindak sebagai Pegguna Anggaran (PA) pada Perangkat Daerah juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kota Solok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

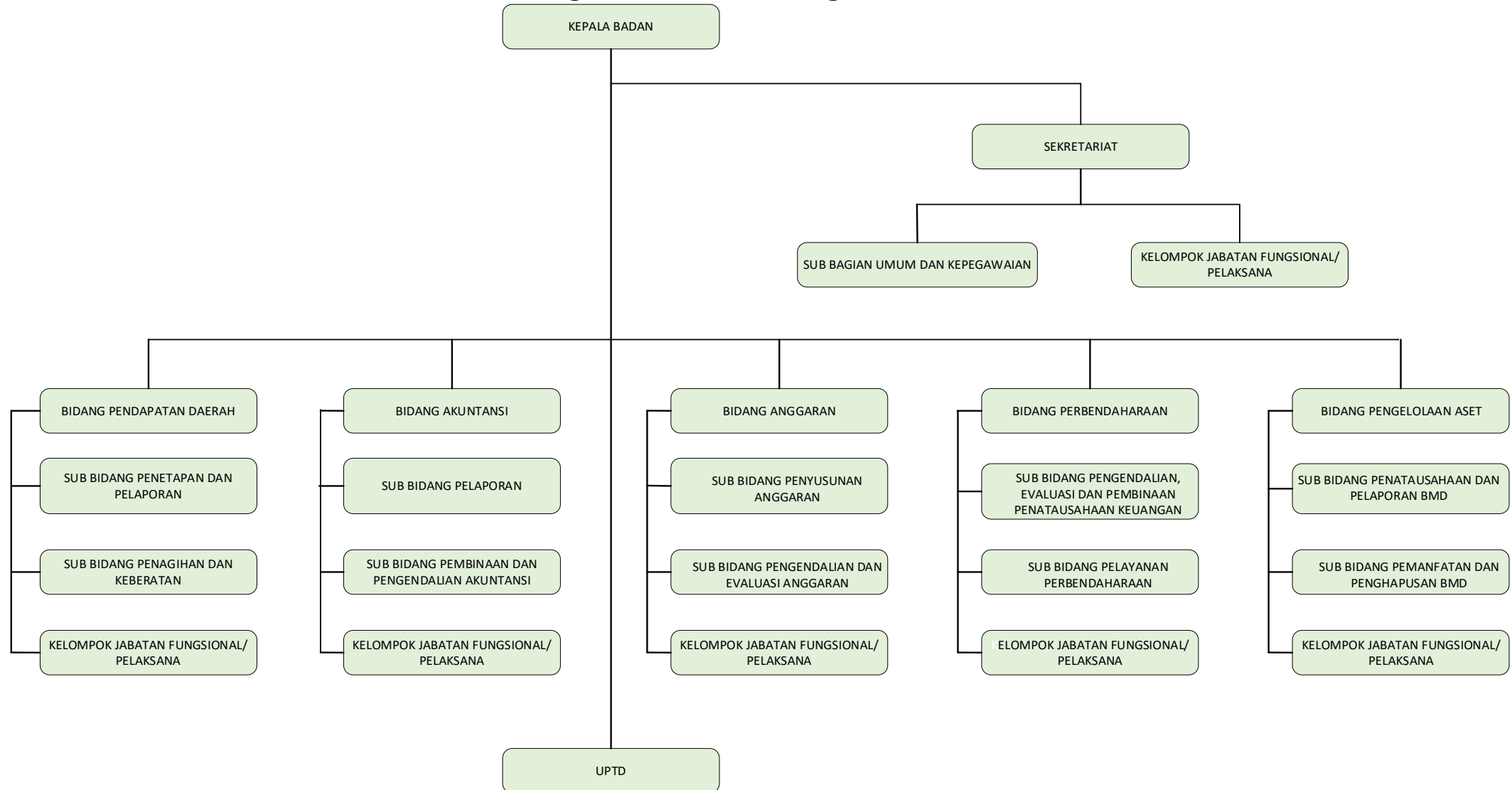
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara Tipelogi Badan Keuangan Daerah Kota Solok tergolong ke dalam Tipe B yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang, berikut rincian susunan organisasi Badan Keuangan Daerah:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan.

2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelaporan.
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- e. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan.
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- g. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD.
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- h. UPTD

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok



Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, uraian tugas dan fungsi jabatan struktural Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan bidang pendapatan. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan dan pendapatan.
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang keuangan dan pendapatan.
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan pendapatan.
 - d. pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Sekretariat, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

 - a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
 - c. memberikan petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
 - d. Mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - e. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi barang/aset berdasarkan prosedur kerja.
 - f. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan prosedur kerja.
 - g. mengoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan badan keuangan daerah berdasarkan usulan dari masing-masing bidang.
 - h. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan berdasarkan prosedur kerja
 - i. membantu kepala badan mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta pengawasan dibidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - c. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan gedung kantor berdasarkan tugas dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
 - d. melaksanakan administrasi barang/aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan .
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pendapatan daerah mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan program kerja bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
memberikan petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
 - c. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. mengoordinasikan pengkajian pengembangan dan penggalan potensi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
 - e. mengoordinasikan pendataan dan pendaftaran pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
 - f. mengoordinasikan penetapan dan pembukuan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
 - g. mengoordinasikan penagihan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
 - h. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang- undangan.

- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penetapan dan pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penetapan dan pelaporan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja sub bidang penetapan dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberikan petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
- d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan terkait penetapan dan pelaporan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan barang kuasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. melaksanakan pengelolaan penetapan dan pelaporan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. melaksanakan pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi realisasi target pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

- 2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan pendapatan Daerah dan tunggakannya, serta melakukan pengawasan teknis administrasi dibidang pemungutan dan penyetoran pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain dari dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja sub bidang penagihan dan keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

- c. memberikan petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan terkait penagihan dan keberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. melaksanakan penagihan pajak Daerah dan tunggakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - f. melaksanakan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah agar tugas terlaksana dengan baik.
 - g. melaksanakan proses administrasi pengajuan keberatan pendapatan asli Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
4. Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi.
- Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi mempunyai fungsi :
- a. merencanakan program kerja bidang akuntansi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait akuntansi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi Daerah dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Daerah.
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Daerah.
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan sistem informasi keuangan Daerah.
 - h. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penerapan sistem akuntansi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sub bidang pelaporan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja sub bidang pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah secara bulanan, triwulanan, dan semesteran.
- f. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

- 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pembinaan dan pengendalian akuntansi.

Dalam melaksanakan tugasnya sub bidang Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja sub bidang pembinaan dan pengendalian akuntansi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengendalian akuntansi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. melaksanakan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- f. melaksanakan akuntansi pejabat pengelolaan keuangan daerah.
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

5. Bidang Anggaran, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyusun program kerja bidang anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- c. mem memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. menyelenggarakan penyusunan kebijakan umum anggaran serta perubahannya.
- e. menyelenggarakan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara serta perubahannya.
- f. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- h. menyelenggarakan verifikasi dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahannya.
- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Bidang anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang penyusunan anggaran.
Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan program kerja sub bidang penyusunan anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait penyusunan anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - e. menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - f. melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahannya.
 - g. melaksanakan penyusunan pergeseran anggaran.
 - h. melaksanakan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - i. melaksanakan verifikasi dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran.
 - j. melaksanakan verifikasi dan penetapan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.

- k. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran.
- Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi :
- a. merencanakan program kerja sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - e. melaksanakan penyusunan surat edaran Walikota tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahannya.
 - g. menyusun kebijakan teknis tentang seleksi hibah dan bantuan sosial.
 - h. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi tentang regulasi penganggaran.
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penganggaran.
 - j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
 - l. ketentuan perundang-undangan.
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
6. Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan pengadministrasian penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas Daerah.
- Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
- a. merencanakan program kerja bidang perbendaharaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait perbendaharaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. mengoordinasikan penerbitan Surat Penyediaan Dana.
- f. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengadministrasian penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- g. mengoordinasikan pengelolaan pengadministrasian penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pemantauan pengadministrasian penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang pengendalian, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan program kerja sub bidang pengendalian, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - d. memfasilitasi penyusunan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah.
 - e. memfasilitasi penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah.
 - f. melaksanakan penyiapan administrasi perbendaharaan.
 - g. menyiapkan bahan operasional terkait penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di sub bidang pengendalian, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
 - h. melaksanakan pelayanan pembinaan penatausahaan keuangan Daerah kepada bendahara pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
- 2) Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di sub bidang Pelayanan Perbendaharaan Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi ;
- a. merencanakan kegiatan sub bidang pelayanan perbendaharaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait sub bidang pelayanan perbendaharaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - e. melaksanakan pengeluaran belanja dan penatausahaan dari rekening kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - f. melaksanakan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan daftar transaksi harian sebagai bahan melakukan rekonsiliasi dengan kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan perbendaharaan negara.
 - g. melakukan verifikasi terhadap laporan pembayaran gaji dan tunjangan serta perhitungan pihak ketiga.
 - h. melaksanakan rekonsiliasi data dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PT Tabungan Pensiun dan Asuransi Pegawai Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. melaksanakan rekonsiliasi data realisasi surat perintah pencairan dana dengan bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.
7. Bidang Pengelolaan Aset, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan aset.
- Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :
- a. merencanakan program kerja bidang pengelolaan aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan aset berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik.
- f. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan standar satuan harga (barang dan pemeliharaan).
- h. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan barang milik Daerah.
- j. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah.
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengelolaan barang milik Daerah.
- l. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah.
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan barang milik Daerah.
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah.
- o. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah.
- p. mengoordinasi penilaian barang milik Daerah.
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penggunaan, pemamfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah.
- r. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja sub bidang penatausahaan dan pelaporan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait penatausahaan dan pelaporan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- f. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah.
- g. melaksanakan penyusunan laporan barang milik Daerah.
- h. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah.
- i. melaksanakan inventarisasi barang milik Daerah.
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya,
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
- e. memfasilitasi pelaksanaan penilaian barang milik Daerah,
- f. memfasilitasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah.
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok disamping jabatan struktural juga diisi oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan didasari atas analisis jabatan dan Analisa beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Walikota.
- c. peraturan perundang-undangan tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- d. kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- e. kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok saat ini terdiri dari Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD).

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Keuangan Daerah dapat dibentuk UPTD.

9. UPTD, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok. UPTD yang berada dibawah naungan Badan Keuangan Daerah dinamai dengan UPTD Fasilitasi Pembiayaan yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD. Hal-hal terkait pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Fasilitasi Pembiayaan diatur tersendiri dalam renstra UPTD Fasilitasi Pembiayaan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Secara kuantitatif sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Solok berjumlah 102 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 56 orang, CPNS sejumlah 4 orang, PPPK sejumlah 5 orang, serta Non ASN berupa pegawai kontrak sejumlah 13 orang dan pegawai kontrak sukarela sejumlah 24 orang, dengan tingkat Pendidikan SMA 24 orang, Diplom 8 orang, Sarjana 53 orang dan magister 17 orang, dengan latar belakang pendidikan formal yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.

Adapun ringkasan sumber daya aparatur pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 sebagaimana diklasifikasikan berdasarkan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN :	21	44	65
	PNS	19	37	56
	CPNS	1	3	4
	PPPK	1	4	5
2	Non ASN :	16	21	37
	Pegawai Kontrak	7	6	13
	Pegawai Kontrak Sukarela	9	15	24
Jumlah		37	65	102

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian BKD Tahun 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1	S.3	0	0	0
2	S.2	17	0	17
3	S.1	31	22	53
4	D.III	5	3	8
5	SMA	12	12	24
6	SMP	0	0	0
7	SD	0	0	0
Jumlah		65	37	102

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian BKD Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Administrator	6	0	6
3	Pengawas	13	0	13
4	Perencana Muda	1	0	1
5	AKPD Muda	5	0	5
6	Staf/Pelaksana	39	37	76
Jumlah		65	37	102

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian BKD Tahun 2025

Berikut rekapitulasi Analisis Beban Kerja (ABK) pada Perangkat Daerah Kota Solok memperlihatkan kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan sumber daya manusia sesuai dengan jabatan yang ada yaitu :

Tabel 2.4
Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok

No	Nama Jabatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kelebihan/ Kekurangan	Keterangan
A	Jabatan Struktural				
1	Kepala	1	1	0	
2	Sekretaris	1	1	0	
3	Kepala Bidang Anggaran	1	1	0	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan	1	1	0	
5	Kepala Bidang Akuntansi	1	1	0	
6	Kepala Bidang Pendapatan	1	1	0	
7	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	1	1	0	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0	
9	Kasubbid Penyusunan Anggaran	1	1	0	
10	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran	1	1	0	
11	Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan	1	1	0	
12	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	1	1	0	
13	Kasubbid Pelaporan	1	1	0	
14	Kasubbid Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi	1	1	0	
15	Kasubbid Penetapan dan Pelaporan	1	1	0	
16	Kasubbid Penagihan dan Keberatan	1	1	0	
17	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	1	1	0	
18	Kasubbid Penatausahaan dan	1	1	0	

No	Nama Jabatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Kelebihan/ Kekurangan	Keterangan
	Pelaporan BMD				
19	Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan	1	1	0	
20	Kepala Tata Usaha UPTD Fasilitasi Pembiayaan	1	1	0	
	Jumlah Jabatan Struktural	20	20	0	
B	Jabatan Fungsional PNS				
1	Perencana Muda	1	1	0	
2	Perencana Pertama	0	1	-1	
3	AKPD Madya	0	2	-2	
4	AKPD Ahli Muda	5	7	-2	
5	AKPD Ahli Pertama	0	5	-5	
6	Arsiparis Madya	0	1	-1	
7	Arsiparis Muda	0	1	-1	
8	Arsiparis Pertama	0	2	-2	
9	Arsiparis Penyelia	0	1	-1	
10	Arsiparis Mahir	0	1	-1	
11	Arsiparis Terampil	0	2	-2	
12	Analisis Kebijakan Pertama	0	1	-1	
13	Pranata Komputer Muda	0	1	-1	
14	Pranata Komputer Pertama	0	1	-1	
	Jumlah Jabatan Fungsional PNS	6	27	-21	
C	Pelaksana				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	19	26	-7	
2	Pranata Layanan Operasional	0	4	-4	
3	Pengelola Layanan Operasional	0	2	-2	
4	Pengolah Data dan Informasi	3	20	-17	
5	Pengadministrasi Perkantoran	8	15	-7	
6	Operator layanan Operasional	1	2	-1	
	Jumlah Pelaksana	31	69	-38	
	Total	57	116	-59	

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian BKD Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas kebutuhan dan ketersediaan aparatur diatas pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok belum mencukupi kebutuhan.

b. Sarana Prasarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada Tahun 2025 memiliki asset dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Keuangan Daerah Kota Solok

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Mini Bus	5			5
2	Sepeda Motor	27			27
3	Mesin Ketik Manual	4	1		5
4	Mesin Ketik Listrik	2			2
5	Mesin Kas Register	3			3
6	Mesin Penghitung Uang	2			2
7	Mesin Hitung	1			1
8	Lemari Besi/Metal	16	2	1	19
9	Lemari Kayu	26	4		30
10	Rak Kayu	1			1
11	Filling Cabinet Besi	23	2		25
12	Filling Cabinet Kayu	2			2
13	Brankas	5			5
14	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	1			1
15	Alat Detektor Uang palsu	1			1
16	Alat Penghancur Kertas	5		2	7
17	Mesin Absensi	3		1	4
18	Mesin Absensi	3		1	4
19	Perporator Besar	2		2	4
20	LCD Projector/Infocus	23	3		26
21	Focusing Screen/Layar LCD Projector	6			6
22	Kotak Surat	1			1
23	Alat Kantor Lainnya	9			9
24	Meja Rapat	29			29
25	Meja Resepsionis	3			3
26	Meja 1/2 Biro	12			12
27	Kursi MC 2005 (Cermen)	10			10
28	Kursi Tamu	1			1
29	Bangku Tunggu	10	1	1	12
30	Kursi Tunggu	2			2
31	Meubeleur lainnya	1			1
32	Jam Elektronik	2			2
33	Mesin Penghisap Debu	2			2
34	Lemari Es	1			1
35	AC Split	38		6	44
36	Televisi	9		1	10
37	Loudspeaker	1			1
38	Conference Microphone	1			1
39	Unit Power Supply	18		9	27
40	Stabilisator	1			1
41	Camera Video	6			6

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
42	Tangga Aluminium	1			1
43	Dispenser	3			3
44	Handy Cam		1		1
45	Karpet	18			18
46	Vertikal Blind				0
47	Gordyin/Kray				0
48	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2			2
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2			2
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5			5
51	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	66	1		67
52	Meja Kerja Pejabat lain-lain		1		1
53	Meja Tamu Biasa		2		2
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2			2
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16			16
56	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33		1	34
57	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1			1
58	Kursi Rapat diruangan Rapat Eselon II	1			1
59	Kursi Hadap pada Meja Kerja Eselon III	15			15
60	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	1			1
61	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2			2
62	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1			1
63	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	22		1	23
64	Audio Amplifier	1			1
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1			1
66	Receiver VHF/FM	1			1
67	Telephone (PABX)	11		1	12
68	Pesawat Telephone	1			1
69	Facsimile	1			1
70	Peralatan antena SHF	1			1
71	Peralatan Studio Vidio dan Film	1			1
72	Sony ICD-UX570F Voice Digital Recorder	1			1
73	Termometer Mercury pengukur Suhu	4			4
74	Stabilizer	1			1
75	Bendera Merah Putih	1			1
76	Kamera Digital	1			1
77	Local Area Network (LAN)	2			2
78	P.C Unit	95			95
79	Laptop	28			28
80	Note Book	13	2		15
81	Tablet PC	1			1
82	Hard Disk	12			12
83	Printer	92		7	99
84	Scanner	6			6
85	External/ Portable Hardisk	2			2
86	Plotter	1			1
87	Server	13			13
88	Router	1			1
89	Acces Point	10			10
90	Peralatan Jaringan lainnya	64			64
Jumlah		875	20	34	929

Sumber : KIB B Laporan BMD BKD Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Solok merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset/barang milik daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset/barang milik daerah untuk melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset/barang milik daerah tersebut. Dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok serta fungsi yaitu pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berpedoman pada Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel merupakan tujuan yang harus dicapai dalam mengukur kinerja pelayanan pada sector pengelolaan keuangan daerah. Sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sector ini adalah dengan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada periode renstra dengan beberapa sasaran dan indikator sasaran yang harus dicapai dalam mendukung capaian kinerja layanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Berikut dapat dijabarkan dalam tabel capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2020 – 2024 :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anggaran Daerah yang Berkualitas			100%	100%				117,20%	100%				117,20%	100%			
2	Laporan Pertanggung-jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Sesuai Aturan Berlaku			100%	100%				100%	100%				100,00%	100%			
3	Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP			100%	100%				100%	100%				100,00%	100%			
4	Penatausahaan Pengelolaan BMD Sesuai Peraturan yang Berlaku			100%	100%				95%	95%				95,00%	95%			
5	Optimalisasi penggalian potensi PAD			7%	8%				-25,06%	13,44%				-313,25%	168%			
6	Optimalisasi Pemungutan PAD			95%	95%				109,01%	99,43%				114,75%	105%			
7	Optimalisasi Penatausahaan dan Pelaporan PAD			100%	100%				100%	100%				100,00%	100%			
8	Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku					88%	90%	92%			92,58%	97,98%	99,43%			105,20%	108,87%	108,08%
9	Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku					100%	100%	100%			100%	100%	97,93%			100,00%	100,00%	97,93%
10	Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku					100%	100%	100%			100%	100%	100%			100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok menunjukkan hasil yang memuaskan dengan sebagian besar indicator berhasil memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan dimasa yang akan datang, adapun kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggungjawab terhadap tupoksi masing-masing.
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah sehingga masih adanya anggapan dan pola pikir/mindset lama (dahulu bisa/tidak apapa sekarang tidak bisa).
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar SKPD masih belum optimal dan intens.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus, dan bimtek baik formal ataupun informal karenan intesitas dan ritme kerja di Badan Keuangan Daerah yang relative tinggi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah berbagai pihak yang memerlukan layanan terkait keuangan, pendapatan dan asset daerah antara lain Perangkat Daerah, Organisasi/Lembaga/Masyarakat, Akademisi, Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat.

Adapun layanan yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok kepada masing-masing kelompok sasaran penerima layanan tersebut antara lain :

a. Perangkat Daerah

Sebagai pengampu urusan pengelolaan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi dan verifikasi kepada Perangkat Daerah terkait :

1. Penganggaran, pelayanan yang diberikan berupa pendampingan penyusunan RKA, verifikasi anggaran OPD, penetapan DPA dan penyiapan kebijakan/regulasi penganggaran

2. Penatausahaan Keuangan, pelayanan yang diberikan berupa pengelolaan kas daerah, proses pencairan dana (SPM, SP2D), layanan pencatatan transaksi keuangan perangkat daerah.
3. Akuntansi dan Pelaporan, pelayanan yang diberikan berupa pendampingan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, konsolidasi laporan keuangan daerah untuk LKPD, pembinaan akuntansi dan pelaporan kepada perangkat daerah dan BLUD.
4. Sistem informasi keuangan daerah, pelayanan yang diberikan berupa pendampingan dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah kepada perangkat daerah.

Sedangkan sebagai pengampu pendapatan daerah memberikan pelayanan konsultasi dan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah bagi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai inner.

Selain itu sebagai pengampu urusan asset daerah Badan Keuangan Daerah memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengamanan aset daerah berupa penyimpanan dokumen sertifikat tanah dan BPKB kendaraan dinas milik masing-masing Perangkat Daerah.

b. Organisasi/Lembaga/Masyarakat

Sebagai pengampu urusan pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait keuangan Perangkat Daerah, sedangkan sebagai pengampu urusan pendapatan daerah memberikan pelayanan konsultasi, pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dan sebagai pengampu asset, Badan Keuangan Daerah Kota Solok memberikan pelayanan pemanfaatan PSU kepada Organisasi/Lembaga/Masyarakat.

c. Akademisi

Sebagai pengampu urusan pengelola keuangan, pendapatan dan asset, Badan Keuangan Daerah memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait data keuangan, pendapatan dan asset dalam pemenuhan kebutuhan penelitian.

d. Pemerinta Daerah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat

Sebagai pengampu urusan pengelola keuangan, Badan Keuangan Daerah memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait keuangan daerah, evaluasi keuangan daerah kepada pemerintah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional, sedangkan sebagai pengampu urusan pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Solok memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait

penerimaan PAD, dana bagi hasil dan transfer keuangan daerah dan sebagai pengampu urusan asset, Badan Keuangan Daerah memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait asset Barang Milik Daerah kepada instansi vertikal dan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan Badan Keuangan Daerah bermitra dengan beberapa perangkat daerah, BUMD (Bank Nagari), Instansi Vertikal, Akademisi, pelaku usaha/masyarakat dalam hal sebagai berikut:

1) Perangkat Daerah,

Adapun perangkat daerah yang menjadi mitra dalam pemberian layanan adalah :

- a. Bapperida bermitra dalam pelayanan perencanaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta bermitra dalam upaya peningkatan pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Dinas Kominfo bermitra dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset melalui pengelolaan Lapor SP4N, disamping itu bermitra dalam keterbukaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat/public sekaligus mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Kecamatan dan Kelurahan bermitra dalam penyampaian SPPT PBB dan pemungutan PBB ke masyarakat diwilayah kerjanya.
- d. Satpol PP bermitra dalam proses pengamanan asset daerah dan penertiban bangunan yang memakai/menyerobot asset milik daerah.
- e. Inspektorat bermitra dalam proses tindak lanjut penyelesaian kerugian keuangan daerah, disamping itu inspektorat bekerjasama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bank Nagari,

Bank Nagari sebagai Rekening Kas Umum Daerah bermitra dalam pelayanan penerimaan kas daerah dari penyetoran pajak dan retribusi daerah dan pengeluaran kas daerah melalui SP2D kepada

bendahara ataupun kepada pihak ke III termasuk melayani rekonsiliasi dengan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

- 3) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),
KPKNL bermitra dengan Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah oleh perangkat daerah kepada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
- 4) Badan Pertanahan Nasional (BPN),
Bermitra dengan Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam pelayanan BPHTB dan Inventarisasi Barang Milik Daerah khususnya asset Tanah.
- 5) PT Taspen (Persero)
PT Taspen merupakan BUMN yang menyelenggarakan program jaminan social bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara yang mencakup manfaat pension, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian, BKD bermitra dengan PT Taspen dalam pengelolaan iuran dan penyaluran manfaat bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- 6) Samsat
Bermitra dengan Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam pengelolaan pendapatan daerah terkait pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- 7) Notaris
Bermitra dengan Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam melakukan validasi BPHTB yang diajukan oleh masyarakat.
- 8) Pelaku Usaha / Dunia Usaha / Wajib Pajak/Retribusi, mendukung pencapaian target penerimaan PAD melalui pembayaran pemungutan PAD termasuk pembayaran atas pemanfaatan asset daerah (sewa).
- 9) Lembaga Pendidikan dan Akademisi,
menjadi mitra dalam penelahaan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah dalam pencapaian kinerja didukung oleh BUMD, antara lain :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang

Bentuk dukungan dalam pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok berupa penyediaan laporan keuangan PDAM Pincuran Gadang yang harus dikonsolidasikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena Laporan Keuangan PDAM merupakan bagian dari entitas pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator dalam pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah dan juga merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran pencapaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang menjadi indikator sasaran pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

2. Bank Nagari

Bank Nagari sebagai Rekening Kas Umum Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai layanan perbankan, teknologi, dan kolaborasi operasional yang berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Bentuk dukungan tersebut berupa :

- a. Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sebagai RKUD Bank Nagari berfungsi sebagai tempat utama transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sehingga Bank Nagari menyediakan layanan transaksi yang cepat, aman dan akurat. Disamping itu dukungan lainnya dalam bentuk implementasi transaksi non tunai pemerintah daerah selaras dengan kebijakan Kemenkeu. Dengan lancarnya proses transaksi kas daerah pada Bank Nagari terutama dalam bentuk pencairan kas daerah melalui SP2D, hal ini berkaitan erat dengan penyerapan anggaran yang merupakan bagian dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada dimensi 4 (empat) IPKD. IPKD sendiri merupakan indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kota Solok
- b. Dukungan Bank Nagari juga dalam bentuk integrasi pembayaran Pajak dan Retribusi daerah untuk peningkatan PAD. Implementasi dukungan dalam bentuk kemudahan dalam sistem pembayaran dan penerimaan pajak daerah melalui system host to host, ATM, Mobile Banking, Internet Banking, Qris, teller dan penyediaan rekening penampungan (escrow

account) untuk jenis pajak tertentu. Dukungan ini dapat mempercepat proses penerimaan pendapatan.

- c. Dukungan lainnya yang diberikan oleh Bank Nagari berupa sinkronisasi data secara realtime untuk memudahkan rekonsiliasi, dan penyediaan aplikasi monitoring rekening kas daerah, fasilitas rekonsiliasi kas dengan bendahara pengeluaran dan penerimaan dan layanan internet banking corporate untuk bendahara, hal ini mendukung keamanan transaksi, efisiensi administrasi dan pengurangan kesalahan dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Solok memiliki tugas pokok dalam urusan pengelolaan keuangan daerah. Badan Keuangan Daerah terlinat dalam berbagai bentuk kerjasama daerah yang bersifat teknis, administratif maupun strategis untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien.

Bentuk kerjasama daerah yang secara langsung menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan Lembaga Perbankan

Jenis kerjasama dengan Lembaga Perbankan dalam hal ini Bank Nagari mencakup :

- a. Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. System pembayaran dan penerimaan pajak daerah
- c. Layanan cash management system dan internet banking.
- d. Fasilitasi transaksi belanja daerah (pencairan SP2D untuk belanja daerah)
- e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari.

2. Kerjasama dengan BUMD

Bentuk kerjasama yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan BUMD mencakup Penyertaan Modal pada PDAM Pincuran Gadang dan Balairung.

3. Kerjasama dengan Swasta

Bentuk kerjasama yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah dengan pihak swasta mencakup :

- a. Notaris/PPAT dalam hal validasi dan pembayaran BPHTB
- b. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi pendapatan daerah dengan pihak ke 3 dan asset daerah (e-BMD) dengan USADI

- c. Kerjasama pemanfaatan BMD oleh pihak swasta (sewa/pinjam pakai).
4. Instansi Pemerintah Lain (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
Bentuk kerjasama yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Pusat mencakup DJPb (Kemenkeu) untuk rekonsiliasi transfer pusat, integrasi system informasi keuangan daerah (SIPD) dengan Kemendagri, KPKNL terkait penilaian BMD atas BMD yang akan dilelang atau dimusnahkan. Sedangkan bentuk kerjasama dengan Pemerintah daerah lainnya berupa saling hibah asset daerah dengan pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Untuk dapat menentukan tujuan dan sasaran, maka diperlukan analisis permasalahan dan isu strategis. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Dalam melakukan perumusan permasalahan isu strategis pada Perangkat Daerah diantaranya dilakukan pengidentifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Perangkat Daerah, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis sehingga pada akhirnya dapat ditentukan isu-isu strategis pada Perangkat Daerah.

Selain itu, identifikasi permasalahan karena perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Solok masih menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan Keuangan Daerah dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Pemetaan permasalahan dalam pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan dalam Pelayanan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah belum optimal	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lemah	Rendahnya tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yakni dokumen RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan APBD, baik dilihat dari segi kesesuaian nomenklatur maupun pagu anggaran.
			Pemahaman metode perencanaan berbasis kinerja kurang memadai
			Keterlambatan informasi penerimaan daerah dari transfer pusat mempengaruhi perencanaan dan penganggaran belanja daerah
		Penyusunan anggaran belum optimal	Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja sehingga indikator kinerja tidak terukur
			Minim data baseline
			Keterlambatan penyusunan APBD yang disebabkan perubahan kebijakan pusat dan revisi berulang dokumen anggaran.
			Kurangnya koordinasi antara TAPD, Bapperida dan SKPD menyebabkan kegiatan prioritas utama tidak teranggarkan atau minim anggaran
			Tidak cermatnya TAPD dalam penyusunan anggaran menyebabkan seringnya terjadi kesalahan rekening mata anggaran belanja, pendapatan dan pembiayaan.
		Pengendalian anggaran belum memadai dan evaluasi anggaran tidak terlaksana	Evaluasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak dilakukan sehingga kegiatan yang tidak efektif tetap dianggarkan pada tahun berikutnya.
			Pedoman penyusunan APBD (SHS, ASB) tidak mengakomodir kebutuhan SKPD.
2	Tata kelola kas daerah dan penatausahaan keuangan daerah yang belum optimal	Penyerapan anggaran belanja yang tidak merata atau rendah pada awal tahun anggaran	Keterlambatan penerbitan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran.
			Proses administrasi yang berbelit sehingga pencairan anggaran lambat
			Kebiasaan pencairan anggaran yang menumpuk diakhir tahun
			Lambatnya penetapan peraturan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Cashflow tidak stabil	pelaksanaan APBD
			Pencairan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah disusun.
			Terlambatnya TKD ke RKUD sehingga realisasi pencairan anggaran kegiatan terhambat atau gagal bayar
			System informasi manajemen kas belum terintegrasi dengan baik.
			Kurangnya kapasitas SDM dan analisis forecasting kas
		Ketidaksesuaian antara realisasi belanja dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan	Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tidak lengkap dan tidak valid
			Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal (SPI) terhadap penggunaan dana
3	Tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan daerah belum optimal	Laporan keuangan kurang andal	Rekonsiliasi antar OPD tidak rutin
			Kesalahan dalam mengimplementasikan penerapan standar akuntansi sesuai SAP
			Kualitas SDM pengelola akuntansi perlu peningkatan
			SOP tidak dijalankan sebagaimana seharusnya
			Pengendalian internal lemah
			Tindak lanjut rekomendasi BPK tidak dilaksanakan secara optimal
		Sistem informasi keuangan daerah belum optimal	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
			Belum semua dokumen pengelolaan keuangan dapat dilihat dan diakses oleh publik
			Belum terintegrasi aplikasi keuangan dan aset
4	Belum optimalnya tata kelola pendapatan daerah	Potensi PAD belum tergal optimal	Tidak adanya peta potensi berbasis digital
			Pendatan dan pemuktakhiran objek pajak tidak berkala
			Koordinasi antar SKPD penki
		Kepatuhan wajib pajak rendah	Sosialisasi terbatas karena efisiensi anggaran
			Pengawasan lapangan lemah
			System penagihan masih manual di beberapa sektor
		Penerimaan pendapatan mengalami kebocoran	Belum seluruh pembayaran terhubung ke system digital
			Lemahnya control internal
			Pengawasan transaksi tidak real time
5	Tata kelola asset daerah belum optimal	Pemanfaatan asset tidak optimal	Tidak adanya analisis kelayakan ekonomi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengamanan aset daerah tidak optimal	Rendahnya kerjasama pemanfaatannaset (KSP, BGS dan BSG)
			Masih adanya aset tanah yang tidak bersertifikat
			Tidak semua aset yang asuransikan
			Masih terjadinya sengketa aset karena dokumentasi sejarah aset yang tidak ada/lemah
		Penatausahaan dan pelaporan aset belum optimal	Belum dilakukannya inventarisasi terhadap semua aset daerah
			Masih adanyan aset yang tidak memiliki dokumem legalitas
			Dalam pencatatan buku inventaris masih ada aset rusak berat/hilang yang tercatat
			Tidak dilakukannya pemusnahan atau penghapusan aset karena wujud assetnya sudah tidak ditemukan
		Pengawasan BMD yang belum optimal	Masih ada aset pemerintah kota Solok yang masih dikuasai pihak lain
6	Tata Kelola Sumber Daya Manusia belum optimal	Kompetensi dan kapasitas SDM pengelola keuangan, pendapatan dan aset masih belum memadai	Minimnya SDM yang mengikuti pelatihan teknis
			Minimnya anggaran peningkatan kapasitas
			Tidak ada pemetaan kompetensi pegawai
			Rendahnya kemampuan analisis, manajerial dan teknis pegawai
		Pemanfaatan, penempatan dan ketersediaan SDM belum sesuai kebutuhan	Seringnya rotasi/mutasi pegawai
			Rekrutmen dan penempatan pegawai tidak berbasis kompetensi
			Jumlah pegawai tidak proporsional antar bidang karena tidak dilakukan analisis kebutuhan SDM
7	Tata Kelola Sarana dan Prasarana Pendukung belum memadai	Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada belum memadai	Anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana minim
			Rasio jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang ada tidak seimbang
			Infrastruktur teknologi informasi (computer dll) tidak memadai
8	Tata Kelola Sistem Informasi Keuangan, Pendapatan dan aset belum optimal	Pengelolaan dan keamanan system informasi belum memadai	Sistem informasi belum terintegrasi
			Terbatasnya infrastruktur teknologi informasi sehingga aplikasi terpisah pemanfataaanya
			Tidak ada backup data berkala
9	Tata Kelola Sistem	Pelaksanaan dan	Audit internal belum terlaksana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengendalian Internal belum optimal	pengawasan SPI lemah	SOP tidak dijalankan secara konsisten
			Resiko fraud sulit terdeteksi

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya sangat signifikan bagi daerah tersebut. Isu ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Pemetaan isu strategis tersebut memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan metode curah pendapat (*brainstorming*) dan sekaligus menganalisa keterkaitan masing-masing isu strategis dengan isu strategis lainnya. Penentuan identifikasi masalah dan isu-isu strategis dilakukan dengan melihat data-data capaian kinerja perangkat daerah dan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dan ditemukan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Analisa isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi daerah dan kesinambungan program dan kegiatan perangkat daerah.

Tabel 2.8
Pemetaan Isu Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Keuangan : 1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel 2. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD	1. Tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah belum optimal. 2. Tata kelola kas daerah dan penatausahaan keuangan daerah yang belum optimal 3. Tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan daerah belum optimal 4. Belum optimalnya tata kelola pendapatan daerah 5. Tata kelola asset daerah belum optimal 6. Tata Kelola Sumber Daya Manusia belum optimal 7. Tata Kelola	a.	1.	1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara		1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 2. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah 3. Optimalisasi pengelolaan asset yang efektif dan efisien 4. Optimalisasi penggunaan system informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, asset dan pendapatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Sarana dan Prasarana Pendukung belum memadai 8. Tata Kelola Sistem Informasi Keuangan, Pendapatan dan asset belum optimal 9. Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal belum optimal					daerah

Isu-isu lingkungan dinamis sebagaimana tertuang pada tabel di atas secara langsung mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Perumusan strategi dalam Renstra perlu mempertimbangkan isu-isu ini untuk memastikan relevansi dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan adalah komponen penting dalam perencanaan strategis yang saling terkait dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sasaran adalah indikator terukur untuk mengukur pencapaian tujuan, strategi adalah rencana aksi untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan adalah pedoman tindakan untuk melaksanakan strategi, maka perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Walikota yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029.

Dalam RPJMD Kota Solok 2025-2029 tertuang visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok terpilih periode 2025-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”**, dengan misi sebagai berikut :

1. Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota solok yang sehat, cerdas, kreatif, Tangguh dan berdaya saing.
2. Memperkuat fondasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang Tangguh, maju dan inklusif.
3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dan berkeadilan
4. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tanggu, partisipasi dan nyaman
5. Memperkuat ketahanan agama. Adat dan pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban
6. Menyediakan ruang public dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju.
7. Menwujudkan pengelolaan lingkungan dan insfrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan
8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah menunjang pelaksanaan misi 3 (tiga) yaitu **“Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Solok Tahun 2025 – 2029 yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegritas
2. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Solok 2025-2029, maka Badan Keuangan Daerah menetapkan tujuan untuk periode 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”**, dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang secara substansi mencerminkan integrasi dari urusan utama yang menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah yaitu urusan keuangan, termasuk pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah. Tujuan tersebut berfokus pada hasil akhir terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan public serta kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam perumusan tujuan dalam renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok tahun 2025-2029 juga memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan perangkat daerah.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Guna mewujudkan tujuan dari Badan Keuangan Daerah Kota Solok tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok, dimana Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi membantu Wali Kota dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dengan demikian dalam rangka pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah maka ditetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Ada beberapa indikator untuk mengukur sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah antara lain :
 - a. Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
 - b. Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
 - c. Nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah
 - d. Nilai penyerapan anggaran
 - e. Nilai kondisi keuangan daerah dan
 - f. Opini BPK atas LKPD
2. Meningkatnya pengelolaan aset daerah
Indikator untuk mengukur sasarannya adalah :
 - a. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)
3. Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah
Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah :
 - a. persentase peningkatan pendapatan asli daerah
 - b. rasio pajak daerah terhadap PDRB

4. Meningkatnya kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan melayani
Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah
 - a. Nilai SAKIP perangkat daerah
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) daerah
 - c. Indeks Pelayanan Publik (IPP) daerah

Berikut rumusan tujuan dan sasaran renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang harus dicapai sampai akhir periode renstra 2025-2029 dengan target indikator yang harus dicapai sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH											
- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegritas - Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Angka)	73	75,20	75,90	76,40	77,90	78,50	80	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Melayani	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,90	72,80	74,70	76,70	78,60	80,50	82,42	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	82,65	83	85	85,50	86	87	88,5	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	84	82,79	83,33	84	84,67	85,33	86,67	
			Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (%)	100	43,40	44,50	45	46	47	48	
			Nilai Penyerapan Anggaran (%)	67,50	100	100	100	100	100	100	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	53,33	96,88	100	100	100	100	100	
			Nilai Kondisi Keuangan Daerah (%)	26	20	20,50	21	21,50	22	22,50	
		Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD) (Angka)	66,25	72,50	74,17	75,83	83,33	83,33	83,33	
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5,24	40,08	2,90	9,02	6,59	9,83	10,42	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,243	0,25	0,3	0,35	0,39	0,44	0,49	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam mencapai tujuan Badan Keuangan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan didukung dengan 4 (empat) sasaran strategis. Adapun tahapan pelaksanaan renstra dalam pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan landasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemantapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tranparan dan Akuntabel	Perwujudan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tranparan dan Akuntabel	Perwujudan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tranparan dan Akuntabel menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan kebijakan yang akan menjelaskan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Strategi Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah
 - a. Sistem akuntabilitas
Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang jelas dan terukur untuk seluruh aparatur BKD
 - b. Peningkatan transparansi

- Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan informasi yang dapat diakses oleh publik
- c. Melakukan pemenuhan belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*)
 - d. Melakukan pemenuhan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
 - e. Meningkatkan kematangan dalam perencanaan dan penganggaran untuk meminimalisir ketidaksesuaian perencanaan dengan penganggaran.
 - f. Memaksimal penyerapan anggaran belanja daerah
 - g. Mengalokasikan belanja daerah untuk program kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
 - h. Peningkatan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah
2. Peningkatan kualitas tata kelola aset daerah
 - a. Optimalisasi dalam perencanaan barang milik daerah
 - b. Optimalisasi dalam pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan produktif
 - c. Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang efektif
 - d. Pengadministrasian barang milik daerah yang andal
 3. Peningkatan Pengelolaan pendapatan daerah menuju kemandirian keuangan daerah
 - a. Optimalisasi pemanfaatan aset sebagai sumber pendapatan daerah
 - b. Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui digitalisasi pendapatan daerah
 - c. Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan potensi PAD
 - d. Meningkatkan transparansi dan pengawasan pendapatan daerah
 4. Peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah
 - b. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya risiko penyimpangan dan kecurangan
 - c. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah
 - d. Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, aset dan pendapatan daerah
 - e. Menyederhanakan birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, aset dan pendapatan daerah dalam memberikan pelayanan

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada periode renstra. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron dan konsisten. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Arah kebijakan Badan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Adapun focus arah kebijakan adalah :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Keuangan Daerah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Pengelolaan keuangan daerah dan aset yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Penguatan pengelolaan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang terintegrasi, konsisten dan berbasis sistem informasi guna mendud	
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan	Penguatan tata kelola pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan keuangan, aset dan pendapatan daerah	
		Meningkatkan target penerimaan PBB-P2 melalui revaluasi	Optimalisasi penerimaan PBB-P2 melalui penyesuaian dan	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		nilai jual obyek pajak (NJOP)	pemutakhiran NJOP yang berbasis data pasar, validasi objek dan subyek pajak serta penguatan sistem pengelolaan PBB-P2 ,	
		Optimalisasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui penguatan tata kelola, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta pemanfaatan teknologi informasi	
		Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi penerimaan pajak daerah	Penguatan sistem pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digital melalui integrasi sistem pembayaran, peningkatan kualitas data dan perluasan layanan elektronik	
		Peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Optimalisasi kinerja keuangan BLUD melalui penguatan tata kelola, peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD secara efektif dan akuntabel	
		Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah	Optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah melalui penataan administrasi, pemutakhiran data, dan pemanfaatan aset secara produktif guna meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap PAD	

BAB VI
PROGRAM, KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

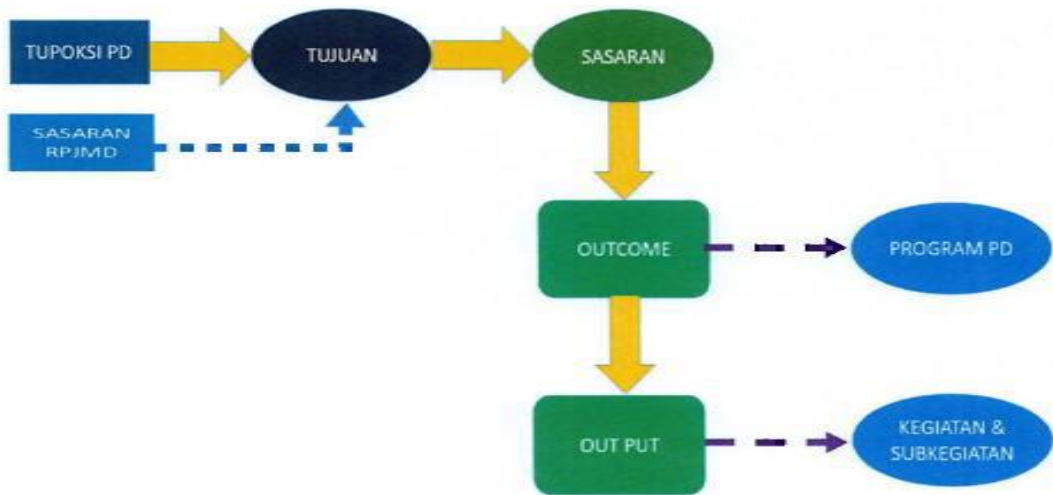
Untuk mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui rangkaian perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam bentuk tujuan, sasaran perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan dari rangkaian pembangunan dari tingkat pemerintah pusat, kementerian/ lembaga dan daerah maka dibutuhkan program, kegiatan, subkegiatan yang akan dieksekusi dalam setiap tahun periode Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program adalah penjabaran kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Kegiatan disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki perencanaan 5 (lima) tahun Badan Keuangan Darah Kota Solok.

Kerangka perumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Badan Keuangan Daerah mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan ditampilkan pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Badan keuangan Daerah



Program dan kegiatan yang dirancang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Keuangan Daerah Kota dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok secara terukur, efisien dan efektif, dengan memperhatikan keterpaduan antar perangkat daerah, relevansi dengan isu strategis, serta prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2025-2029, Badan Keuangan Daerah Kota Solok melaksanakan 4 (empat) program antara lain :

1. Program Penunjang urusan pemerinta daerah kabupaten/kota
2. Program pengelolaan keuangan daerah
3. Program pengelolaan barang milik daerah
4. Program pengelolaan pendapatan daerah

Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, berdasarkan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok dirumuskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH							
- Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegritas	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Melayani			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Angka)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Evaluasi Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah		Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)		
					Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (%)		
					Nilai Penyerapan Anggaran (%)		
					Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
					Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)		
					Nilai Kondisi Keuangan Daerah (%)		
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran			Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Dokumen KUA/PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Dokumen APBD/APBD-P	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen))	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ((Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi ((Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Meningkatnya Pengendalian Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan		Nilai Penyerapan Anggaran (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
				Meningkatnya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Nilai Kondisi Keuangan Daerah (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Penerapan Transparansi Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
		Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah		Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD) (Angka)		
					Persentase pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase administrasi BMD yang andal (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Meningkatnya Administrasi BMD yang Andal	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)		
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase peningkatan realisasi pajak daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase jumlah OPD inner yang realisasi retribusi daerah >= 100% (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok mengacu pada Kepmendari Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat beberapa perubahan pada program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya.

Dari perumusan Rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Solok Tahun 2025-2029, maka disusun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun rencana strategis 2025-2029 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				25.798.534.508,00		26.142.575.097,00		28.110.644.216,00		28.220.329.011,00		28.331.659.079,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.885.375.210,00		19.998.609.990,00		22.074.665.490,00		22.060.973.762,00		22.698.522.446,00		
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	17.874.387.460,00	100	19.986.667.990,00	100	22.062.026.390,00	100	22.047.760.208,00	100	22.684.655.715,00	5.02.0.00.0. 00.24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.201.108.436,00		12.003.300.000,00		12.671.465.000,00		13.233.638.250,00		13.525.320.162,00		
Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	812	910	11.198.153.436,00	915	12.000.000.000,00	920	12.668.000.000,00	925	13.230.000.000,00	930	13.521.500.000,00		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.198.153.436,00		12.000.000.000,00		12.668.000.000,00		13.230.000.000,00		13.521.500.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	812	910	11.198.153.436,00	915	12.000.000.000,00	920	12.668.000.000,00	925	13.230.000.000,00	930	13.521.500.000,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		60	50.000.000,00	109	60.000.000,00	109	63.000.000,00	109	66.150.000,00	109	69.457.500,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	6	8		8		8		8		8			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5		10		10		10		10			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		60	0,00	109	0,00	109	0,00	109	0,00	109	0,00		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	8	50.000.000,00	8	60.000.000,00	8	63.000.000,00	8	66.150.000,00	8	69.457.500,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				906.263.350,00		980.000.090,00		1.029.000.095,00		1.080.450.099,00		1.134.472.602,00		
Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	7	906.263.350,00	7	980.000.090,00	7	1.029.000.095,00	7	1.080.450.099,00	7	1.134.472.602,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		3		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.771.000,00		6.850.000,00		7.192.500,00		7.552.125,00		7.929.731,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	5.771.000,00	4	6.850.000,00	4	7.192.500,00	4	7.552.125,00	4	7.929.731,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		3	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.380.000,00		17.350.090,00		18.217.595,00		19.128.474,00		20.084.897,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	14	16.380.000,00	14	17.350.090,00	14	18.217.595,00	14	19.128.474,00	14	20.084.897,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				91.962.850,00		100.500.000,00		105.525.000,00		110.801.250,00		116.341.312,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	7	91.962.850,00	7	100.500.000,00	7	105.525.000,00	7	110.801.250,00	7	116.341.312,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				91.456.500,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2	91.456.500,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	2	110.250.000,00	2	115.762.500,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.500.000,00		5.300.000,00		5.565.000,00		5.843.250,00		6.135.412,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	11	4.500.000,00	11	5.300.000,00	11	5.565.000,00	11	5.843.250,00	11	6.135.412,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				696.193.000,00		750.000.000,00		787.500.000,00		826.875.000,00		868.218.750,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	696.193.000,00	12	750.000.000,00	12	787.500.000,00	12	826.875.000,00	12	868.218.750,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	3	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		5		5		5		5		5			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	3	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.406.785.074,00		6.652.000.000,00		7.984.500.000,00		7.333.782.500,00		7.600.479.124,00		
Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		2	5.406.785.074,00	2	6.652.000.000,00	2	7.984.500.000,00	2	7.333.782.500,00	2	7.600.479.124,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.019.000,00		2.500.000,00		2.625.000,00		2.756.250,00		2.894.062,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2	2.019.000,00	2	2.500.000,00	2	2.625.000,00	2	2.756.250,00	2	2.894.062,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.400.404.074,00		5.299.000.000,00		6.563.850.000,00		5.842.100.000,00		6.034.212.500,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.400.404.074,00	12	5.299.000.000,00	12	6.563.850.000,00	12	5.842.100.000,00	12	6.034.212.500,00		
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.004.362.000,00		1.350.500.000,00		1.418.025.000,00		1.488.926.250,00		1.563.372.562,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.004.362.000,00	12	1.350.500.000,00	12	1.418.025.000,00	12	1.488.926.250,00	12	1.563.372.562,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.198.000,00		197.167.900,00		207.026.295,00		217.377.609,00		228.246.489,00		
Meningkatnya Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		5	183.198.000,00	5	197.167.900,00	5	207.026.295,00	5	217.377.609,00	5	228.246.489,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	60		60		60		60		60			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.820.000,00		140.200.000,00		147.210.000,00		154.570.500,00		162.299.025,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	40	135.820.000,00	40	140.200.000,00	40	147.210.000,00	40	154.570.500,00	40	162.299.025,00		
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.838.000,00		22.400.200,00		23.520.210,00		24.696.220,00		25.931.031,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	19.838.000,00	1	22.400.200,00	1	23.520.210,00	1	24.696.220,00	1	25.931.031,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.540.000,00		34.567.700,00		36.296.085,00		38.110.889,00		40.016.433,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	60	27.540.000,00	60	34.567.700,00	60	36.296.085,00	60	38.110.889,00	60	40.016.433,00		
5.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				79.987.600,00		97.500.000,00		110.500.000,00		120.000.000,00		130.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	79.987.600,00	1	97.500.000,00	1	110.500.000,00	1	120.000.000,00	1	130.500.000,00		
5.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				79.987.600,00		97.500.000,00		110.500.000,00		120.000.000,00		130.500.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	79.987.600,00	1	97.500.000,00	1	110.500.000,00	1	120.000.000,00	1	130.500.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	11,25	11,2	9.987.750,00	11,6	10.942.000,00	12	11.489.100,00	12,4	12.063.554,00	12,8	12.666.731,00		
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,5	21,72		22,44		23,16		23,88		24,6			
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	19,5	22,15		22,7		23,25		23,88		24,35			
	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	12,5	17,75		18		18,25		18,5		18,75			
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.032.750,00		7.642.000,00		8.024.100,00		8.425.304,00		8.846.569,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	5.409.000,00	4	5.752.000,00	4	6.040.650,00	4	6.342.682,00	4	6.659.816,00		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.409.000,00		5.752.000,00		6.040.650,00		6.342.682,00		6.659.816,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	5.409.000,00	4	5.752.000,00	4	6.040.650,00	4	6.342.682,00	4	6.659.816,00		
Meningkatnya Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		1	1.623.750,00	1	1.890.000,00		1.983.450,00	1	2.082.622,00	1	2.186.753,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.523.750,00		1.765.000,00		1.833.450,00		1.932.622,00		2.011.753,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	1.523.750,00	4	1.765.000,00	4	1.833.450,00	4	1.932.622,00	4	2.011.753,00		
5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				100.000,00		125.000,00		150.000,00		150.000,00		175.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		1	100.000,00	1	125.000,00		150.000,00	1	150.000,00	1	175.000,00		
Meningkatnya Evaluasi Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		16	0,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		16	0,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00	16	0,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.201.108.436,00		12.003.300.000,00		12.671.465.000,00		13.233.638.250,00		13.525.320.162,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	2.955.000,00	2	3.300.000,00	2	3.465.000,00	2	3.638.250,00	2	3.820.162,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.955.000,00		3.300.000,00		3.465.000,00		3.638.250,00		3.820.162,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	2.955.000,00	2	3.300.000,00	2	3.465.000,00	2	3.638.250,00	2	3.820.162,00		
Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	100	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.150.000,00	100	1.150.000,00	100	1.200.000,00		
5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.200.000,00		
Meningkatnya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.150.000,00	12	1.150.000,00	12	1.200.000,00		
5.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.200.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.150.000,00	12	1.150.000,00	12	1.200.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.606.514.227,00		3.602.834.187,00		3.238.791.260,00		3.282.307.832,00		2.696.442.833,00		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	113.411.800,00	WTP	135.120.800,00	WTP	141.876.840,00	WTP	148.970.680,00	WTP	156.419.228,00	5.02.0.00.0. 00.24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH	
	Nilai Kondisi Keuangan Daerah (%)	26	20,50		21		21,50		22		22,50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	53,33	100		100		100		100		100			
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				91.152.600,00		109.690.300,00		115.174.815,00		120.933.554,00		126.980.228,00		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	62	52	74.584.500,00	52	89.560.000,00	52	94.038.000,00	52	98.739.900,00	52	103.676.894,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12												
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	12	13		13		13		13		13			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				1.396.900,00		4.510.000,00		4.735.500,00		4.972.275,00		5.220.888,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	62	52	1.396.900,00	52	4.510.000,00	52	4.735.500,00	52	4.972.275,00	52	5.220.888,00		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4.243.600,00		5.050.000,00		5.302.500,00		5.567.625,00		5.846.006,00		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	12	13	4.243.600,00	13	5.050.000,00	13	5.302.500,00	13	5.567.625,00	13	5.846.006,00		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				47.276.600,00		60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2	3	47.276.600,00	3	60.000.000,00	3	63.000.000,00	3	66.150.000,00	3	69.457.500,00		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				21.667.400,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	21.667.400,00	4	20.000.000,00	4	21.000.000,00	4	22.050.000,00	4	23.152.500,00		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	16.568.100,00	1	20.130.300,00	1	21.136.815,00	1	22.193.654,00	1	23.303.334,00		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	62	52		52		52		52		52			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				4.875.000,00		5.375.000,00		5.643.750,00		5.925.937,00		6.222.233,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	4.875.000,00	1	5.375.000,00	1	5.643.750,00	1	5.925.937,00	1	6.222.233,00		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1.267.300,00		2.867.300,00		3.010.665,00		3.161.198,00		3.319.257,00		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1.267.300,00	1	2.867.300,00	1	3.010.665,00	1	3.161.198,00	1	3.319.257,00		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1.064.000,00		1.665.000,00		1.748.250,00		1.835.662,00		1.927.445,00		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1.064.000,00	1	1.665.000,00	1	1.748.250,00	1	1.835.662,00	1	1.927.445,00		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				9.361.800,00		10.223.000,00		10.734.150,00		11.270.857,00		11.834.399,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	62	52	9.361.800,00	52	10.223.000,00	52	10.734.150,00	52	11.270.857,00	52	11.834.399,00		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				22.259.200,00		25.430.500,00		26.702.025,00		28.037.126,00		29.439.000,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penerapan Transparansi Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	22.259.200,00	1	25.430.500,00	1	26.702.025,00	1	28.037.126,00	1	29.439.000,00		
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				22.259.200,00		25.430.500,00		26.702.025,00		28.037.126,00		29.439.000,00		
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	22.259.200,00	1	25.430.500,00	1	26.702.025,00	1	28.037.126,00	1	29.439.000,00		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan	Nilai Penyerapan Anggaran (%)	67,5	100	5.390.081.477,00	100	1.671.004.887,00	100	1.036.107.190,00	100	1.037.912.549,00	100	1.039.808.174,00		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				31.842.200,00		34.387.800,00		36.107.190,00		37.912.549,00		39.808.174,00		
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kas Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	806	252	2.864.500,00	252	3.156.900,00	252	3.314.745,00	252	3.480.482,00	252	3.654.505,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	68	42		42		42		42		42			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dana Transfer Lainnya (Dokumen)													
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1.634.500,00		1.706.900,00		1.792.245,00		1.881.857,00		1.975.949,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	68	42	1.634.500,00	42	1.706.900,00	42	1.792.245,00	42	1.881.857,00	42	1.975.949,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1.230.000,00		1.450.000,00		1.522.500,00		1.598.625,00		1.678.556,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	806	252	1.230.000,00	252	1.450.000,00	252	1.522.500,00	252	1.598.625,00	252	1.678.556,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	47	52	18.340.200,00	52	19.700.900,00	52	20.685.945,00	52	21.720.242,00	52	22.806.253,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				13.555.200,00		14.350.900,00		15.068.445,00		15.821.867,00		16.612.960,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	2	3	13.555.200,00	3	14.350.900,00	3	15.068.445,00	3	15.821.867,00	3	16.612.960,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4.785.000,00		5.350.000,00		5.617.500,00		5.898.375,00		6.193.293,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	47	52	4.785.000,00	52	5.350.000,00	52	5.617.500,00	52	5.898.375,00	52	6.193.293,00		
Meningkatnya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	75	49	10.637.500,00	49	11.530.000,00	49	12.106.500,00	49	12.711.825,00	49	13.347.416,00		
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	0											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10.637.500,00		11.530.000,00		12.106.500,00		12.711.825,00		13.347.416,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	75	49	10.637.500,00	49	11.530.000,00	49	12.106.500,00	49	12.711.825,00	49	13.347.416,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.358.239.277,00		1.636.617.087,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12	12	5.358.239.277,00	12	1.636.617.087,00	0	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				4.358.239.277,00		636.617.087,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12	12	4.358.239.277,00	12	636.617.087,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (%)	100	44,50	1.103.020.950,00	45	1.796.708.500,00	46	2.060.807.230,00	47	2.095.424.603,00	48	1.500.215.431,00		
	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	84	83,33		84		84,67		85,33		86,67			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.103.020.950,00		1.796.708.500,00		2.060.807.230,00		2.095.424.603,00		1.500.215.431,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen KUA/PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	49.796.800,00	2	45.970.000,00	2	48.268.500,00	2	50.681.924,00	2	53.216.020,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				24.898.400,00		22.985.000,00		24.134.250,00		25.340.962,00		26.608.010,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	24.898.400,00	2	22.985.000,00	2	24.134.250,00	2	25.340.962,00	2	26.608.010,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				24.898.400,00		22.985.000,00		24.134.250,00		25.340.962,00		26.608.010,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	24.898.400,00	2	22.985.000,00	2	24.134.250,00	2	25.340.962,00	2	26.608.010,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen APBD/APBD-P	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	3	1.023.087.250,00	3	1.718.485.500,00	3	1.978.673.080,00	3	2.009.183.747,00	3	1.409.662.533,00		
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	26		26		26		26		26			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	26		26		26		26		26			
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				2.499.000,00		3.567.000,00		3.745.350,00		3.932.617,00		4.129.247,00		
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	26	2.499.000,00	26	3.567.000,00	26	3.745.350,00	26	3.932.617,00	26	4.129.247,00		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				9.447.000,00		10.587.000,00		11.116.350,00		11.672.167,00		12.255.775,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	26	9.447.000,00	26	10.587.000,00	26	11.116.350,00	26	11.672.167,00	26	12.255.775,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				964.135.000,00		1.650.766.000,00		1.907.567.605,00		1.934.523.000,00		1.331.268.750,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	964.135.000,00	2	1.650.766.000,00	2	1.907.567.605,00	2	1.934.523.000,00	2	1.331.268.750,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				47.006.250,00		53.565.500,00		56.243.775,00		59.055.963,00		62.008.761,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	3	47.006.250,00	3	53.565.500,00	3	56.243.775,00	3	59.055.963,00	3	62.008.761,00		
Meningkatnya Pengendalian Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6	6	30.136.900,00	6	32.253.000,00	6	33.865.650,00	6	35.558.932,00	6	37.336.878,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penggangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		26		26		26		26		26			
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				30.136.900,00		32.253.000,00		33.865.650,00		35.558.932,00		37.336.878,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6	6	30.136.900,00	6	32.253.000,00	6	33.865.650,00	6	35.558.932,00	6	37.336.878,00		
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penggangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.006.554.121,00		2.198.136.420,00		2.437.043.241,00		2.498.895.982,00		2.539.634.795,00		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif (%)	100	100	1.006.554.121,00	100	2.198.136.420,00	100	2.437.043.241,00	100	2.498.895.982,00	100	2.539.634.795,00	5.02.0.00.0. 00.24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH	
	Persentase kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan (%)	60	83,33		91,67		91,67		91,67		91,67			
	Persentase pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase administrasi BMD yang andal (%)	62,5	62,5		62,5		75		75		75			
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.006.554.121,00		2.198.136.420,00		2.437.043.241,00		2.498.895.982,00		2.539.634.795,00		
Meningkatnya Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	9	14	197.162.200,00	14	201.270.000,00	14	211.333.500,00	14	221.900.175,00	14	232.995.183,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				800.000,00		1.270.000,00		1.333.500,00		1.400.175,00		1.470.183,00		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	800.000,00	1	1.270.000,00	1	1.333.500,00	1	1.400.175,00	1	1.470.183,00		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				196.362.200,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	9	14	196.362.200,00	14	200.000.000,00	14	210.000.000,00	14	220.500.000,00	14	231.525.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41	42	166.228.050,00	42	180.920.200,00	42	189.966.210,00	42	199.464.519,00	42	209.437.742,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.999.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	2.999.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				794.700,00		2.188.700,00		2.298.135,00		2.413.041,00		2.533.693,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	794.700,00	2	2.188.700,00	2	2.298.135,00	2	2.413.041,00	2	2.533.693,00		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				11.159.100,00		12.950.000,00		13.597.500,00		14.277.375,00		14.991.243,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	11.159.100,00	1	12.950.000,00	1	13.597.500,00	1	14.277.375,00	1	14.991.243,00		
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				3.852.000,00		4.321.500,00		4.537.575,00		4.764.453,00		5.002.675,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	3.852.000,00	4	4.321.500,00	4	4.537.575,00	4	4.764.453,00	4	5.002.675,00		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				7.163.250,00		7.860.000,00		8.253.000,00		8.665.650,00		9.098.932,00		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	3	3	7.163.250,00	3	7.860.000,00	3	8.253.000,00	3	8.665.650,00	3	9.098.932,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				140.259.100,00		153.600.000,00		161.280.000,00		169.344.000,00		177.811.199,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	41	42	140.259.100,00	42	153.600.000,00	42	161.280.000,00	42	169.344.000,00	42	177.811.199,00		
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	12.674.400,00	2	15.489.500,00	2	16.263.975,00	2	17.077.173,00	2	17.931.029,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				5.214.400,00		6.530.500,00		6.857.025,00		7.199.876,00		7.559.869,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2	5.214.400,00	2	6.530.500,00	2	6.857.025,00	2	7.199.876,00	2	7.559.869,00		
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1.516.800,00		2.150.000,00		2.257.500,00		2.370.375,00		2.488.893,00		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	1.516.800,00	2	2.150.000,00	2	2.257.500,00	2	2.370.375,00	2	2.488.893,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				3.052.100,00		3.594.000,00		3.773.700,00		3.962.385,00		4.160.504,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	3.052.100,00	2	3.594.000,00	2	3.773.700,00	2	3.962.385,00	2	4.160.504,00		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.891.100,00		3.215.000,00		3.375.750,00		3.544.537,00		3.721.763,00		

Bab IV Program Kegiatan
dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	1	2.891.100,00	1	3.215.000,00	1	3.375.750,00	1	3.544.537,00	1	3.721.763,00		
Meningkatnya Administrasi BMD yang Andal	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	630.489.471,00	2	1.800.456.720,00	2	2.019.479.556,00	2	2.060.454.115,00	2	2.079.270.841,00		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				630.489.471,00		1.800.456.720,00		2.019.479.556,00		2.060.454.115,00		2.079.270.841,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	630.489.471,00	2	1.800.456.720,00	2	2.019.479.556,00	2	2.060.454.115,00	2	2.079.270.841,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				300.090.950,00		342.994.500,00		360.144.225,00		378.151.435,00		397.059.005,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah (%)	-4,30	81	300.090.950,00	82	342.994.500,00	83	360.144.225,00	84	378.151.435,00	85	397.059.005,00	5.02.0.00.0.00 .24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH	
	Persentase jumlah OPD inner yang realisasi retribusi daerah >= 100% (%)	36	55		64		73		82		100			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				300.090.950,00		342.994.500,00		360.144.225,00		378.151.435,00		397.059.005,00		
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	3	3	173.282.100,00	3	205.029.000,00	3	215.380.450,00	3	226.249.472,00	3	237.661.944,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				19.707.100,00		26.110.000,00		27.415.500,00		28.786.275,00		30.225.588,00		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	3	2	19.707.100,00	2	26.110.000,00	2	27.415.500,00	2	28.786.275,00	2	30.225.588,00		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				23.950.000,00		47.364.000,00		49.732.200,00		52.218.810,00		54.829.750,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	1	23.950.000,00	1	47.364.000,00	1	49.732.200,00	1	52.218.810,00	1	54.829.750,00		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				100.000.000,00		108.000.000,00		113.500.000,00		119.275.000,00		125.338.750,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	108.000.000,00	1	113.500.000,00	1	119.275.000,00	1	125.338.750,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				29.625.000,00		23.555.000,00		24.732.750,00		25.969.387,00		27.267.856,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	3	3	29.625.000,00	3	23.555.000,00	3	24.732.750,00	3	25.969.387,00	3	27.267.856,00		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	3		126.808.850,00		135.965.500,00		142.763.775,00		149.901.963,00		157.397.061,00		
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	3	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	7	36		36		36		36		36			
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				49.916.000,00		52.000.000,00		54.600.000,00		57.330.000,00		60.196.500,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5	12	49.916.000,00	12	52.000.000,00	12	54.600.000,00	12	57.330.000,00	12	60.196.500,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				9.376.100,00		10.400.000,00		10.920.000,00		11.466.000,00		12.039.300,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	7	36	9.376.100,00	36	10.400.000,00	36	10.920.000,00	36	11.466.000,00	36	12.039.300,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				57.616.750,00		53.565.500,00		56.243.775,00		59.055.963,00		62.008.761,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	57.616.750,00	12	53.565.500,00	12	56.243.775,00	12	59.055.963,00	12	62.008.761,00		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				9.900.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	3	5	9.900.000,00	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.050.000,00	5	23.152.500,00		
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)			0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)			0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

Berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan telah disusun pada tabel diatas, maka Badan Keuangan Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada program prioritas pembangunan Kota Solok yang berfokus pada upaya :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, sehat, cerdas, kreatif, Tangguh dan berdaya saing.
2. Penurunan Kemiskinan, mengurangi ketimpangan serta perlindungan sosial yang adaptif dan berkeadilan
3. Perekonomian kota yang Tangguh, maju dan inklusif
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketertibsn umum dan pelayanan publik berkualitas
5. Membangun ketahanan adat, agama dan pemajuan kebudayaan
6. Mewujudkan lingkungan dan insfrastuktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung program prioritas pembangunan tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Solok melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0011 – Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003 – Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
3.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Dari tabel diatas, untuk mendukung program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2025-2029 pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok terdiri dari 4 (empat) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 59 ((lima puluh Sembilan) sub kegiatan prioritas pembangunan. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan ini saling mendukung untuk “mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan keuangan yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis Badan Keuangan Daerah 2025-2029, maka Badan Keuangan Daerah harus mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui beberapa indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan strategis.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi acuan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah dicapai. Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bidang urusan keuangan daerah. Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dimana IKU berfungsi sebagai parameter keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra.

Indikator Kinerja Utama memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja Badan Keuangan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya IKU memungkinkan pemantauan secara berkala, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan jika terjadi penurunan kinerja dan kesalahan dalam pelaksanaan program kegiatan. IKU meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. IKU yang jelas dan terukur dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sehingga tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berikut IKU Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.24.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH									
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	73	75,20	75,90	76,40	77,90	78,50	80	
3.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	Angka	66,25	72,50	74,17	75,83	83,33	83,33	83,33	
4.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	5,24	40,08	2,90	9,02	6,59	9,83	10,42	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,90	72,80	74,70	76,70	78,60	80,50	82,42	
6.	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	84	82,79	83,33	84	84,67	85,33	86,67	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	83	85	85,50	86	87	88,5	
8.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,243	0,25	0,3	0,35	0,39	0,44	0,49	
9.	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	100	43,40	44,50	45	46	47	48	
10.	Nilai Penyerapan Anggaran	%	67,50	100	100	100	100	100	100	
11.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
12.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
13.	Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	53,33	96,88	100	100	100	100	100	
14.	Nilai Kondisi Keuangan Daerah	%	26	20	20,50	21	21,50	22	22,50	

4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Keuangan Daerah Kota Solok merupakan tolok ukur utama dalam menilai efektifitas pencapaian sasaran strategis dalam mengelola keuangan daerah. IKK memberikan gambaran tentang kinerja Badan Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. IKK juga menjadi dasar melakukan evaluasi kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dapat dapat terlaksana karena kinerja Badan Keuangan Daerah dapat diukur dan dilaporkan secara jelas.

Semua Indikator Kinerja Utama akan menjadi Indikator Kinerja Kunci Badan keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029, selaras dengan Indikator Kinerja pada RPJMD Kota Solok 2025-2029. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 adalah :

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		Angka	73	75,20	75,90	76,40	77,90	78,50	80	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	70,90	72,80	74,70	76,70	78,60	80,50	82,42	
4.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	positif	Angka	66,25	72,50	74,17	75,83	83,33	83,33	83,33	
5.	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	positif	%	84	82,79	83,33	84	84,67	85,33	86,67	
6.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	positif	%	5,24	40,08	2,90	9,02	6,59	9,83	10,42	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,65	83	85	85,50	86	87	88,5	
8.	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	positif	%	100	43,40	44,50	45	46	47	48	
9.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	positif	(%)	0,243	0,25	0,3	0,35	0,39	0,44	0,49	
10.	Nilai Penyerapan Anggaran	positif	%	67,50	100	100	100	100	100	100	
11.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	positif	Indeks	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
12.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	positif	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
13.	Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	positif	%	53,33	96,88	100	100	100	100	100	
14.	Nilai Kondisi Keuangan Daerah	positif	%	26	20	20,50	21	21,50	22	22,50	
15.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	positif	%	1,21	1,21	1,25	1,75	2	2,25	2,50	
16.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	%	9,16	9,18	9,20	9,25	9,30	9,35	9,40	
17.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	positif	%	96,21	96,25	96,75	97	97,25	97,50	97,75	
18.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	positif	%	41,09	40	39,50	38	37	37	36	
19.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	positif	%	5,23	13,10	14	14,25	14,75	15	15,50	
20.	Persentase Penurunan SILPA	negatif	%	-98,15	0	0	0	0	0	0	

BAB V

PENUTUP

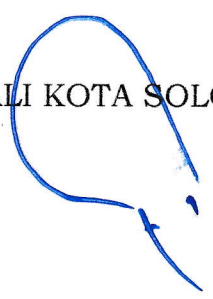
Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan pendapatan. Dalam kurun waktu 2025-2029, Badan Keuangan Daerah Kota Solok menargetkan terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala baik internal maupun eksternal. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam proses pencapaiannya. Temuan dari evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi agar target yang belum tercapai dapat dikejar secara lebih efektif.

Semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK



RAMADHANI KIRANA PUTRA

Meta Data Indikator Renstra Badan Keuangan Daerah
Tahun 2025-2029

A. Indikator Tujuan Badan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Definisi	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indicator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Sedangkan dimensi IPKD sendiri adalah suatu besaran yang terdiri dari indicator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{IPKD} = \frac{\text{jumlah nilai komponen dimensi IPKD}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$ Atau $\text{IPKD} = \frac{\text{D1} + \text{D2} + \text{D3} + \text{D4} + \text{D5} + \text{D6}}{6} \times 100\%$ Keterangan : D = Dimensi IPKD D1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran D2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD D3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah D4 = Penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja D5 = Kondisi keuangan daerah D6 = Opini BPK
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Adapun kategori hasil pengukuran IPKD adalah 1. Skala 80-100, kategori baik, 2. Skala 51-79, kategori cukup baik 3. Skala ≤ 50, kategori kurang baik
Sumber Data	Sumber data untuk pengukuran IPKD berasal dari dokumen/laporan : 1. RPJMD 2. RKPD 3. APBD 4. Perda APBD dan APBD-Perubahan 5. RENJA-PD 6. KUA 7. PPAS 8. Perkada APBD 9. DPA – SKPD 10. LK BUMD 11. LAKIP 12. LKPD 13. Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 14. Opini BPK 15. Daftar RUP 16. SK- PPKD 17. SPM 18. Mandatory Spending
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi dan hasil audit dengan dokumen sebagai evidence yang harus diupload pada aplikasi IPKD)

Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi IPKD dari BKSDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
-------------------	---

B. Indikator Sasaran Badan Keuangan Daerah

1. Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (D1)

Nama Indikator	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
Definisi	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan mengukur tingkat kesesuaian program dan pagu antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
Rumus Perhitungan	Jumlah nilai indikator kesesuaian dokumen Perencanaan dan Penganggaran $D1 = \frac{\text{Jumlah Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times \text{bobot}$ Atau $D1 = \frac{D1.1 + D1.2 + D1.3 + D1.4 + D1.5}{5} \times 15$ Jumlah bobot pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah 15 Keterangan indicator : D1.1 = Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD. $\text{nilai skor D1.1} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian nomenklatur Program RPJMD dengan RKPD}}{\text{jumlah program}}$ Apabila nomenklatur program pada masing-masing program pada RPJMD dengan RKPD pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.2 = Kesesuaian nomenklatur program RKPD dengan KUA-PPAS $\text{nilai skor D1.2} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian nomenklatur Program RKPD dengan KUA – PPAS}}{\text{jumlah program}}$ Apabila nomenklatur program pada masing-masing program pada RKPD dengan KUA-PPAS pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.3 = Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dengan APBD $\text{nilai skor D1.3} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian nomenklatur Program KUA – PPAS dengan APBD}}{\text{jumlah program}}$

	Apabila nomenklatur program pada masing-masing program pada KUA-PPAS dengan APBD pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.4 = Kesesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS $\text{nilai skor D1.4} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian Pagu Program RKPD dengan KUA – PPAS}}{\text{jumlah program}}$ Apabila pagu program pada masing-masing program pada RKPD dengan KUA-PPAS pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.5 = Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dengan RKPD $\text{skor D1.5} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian Pagu Program KUA – PPAS dengan APBD}}{\text{jumlah program}}$ Apabila pagu program pada masing-masing program pada KUA-PPAS dengan APBD pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0.
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah semakin baik yang mengindikasikan kualitas tata kelola keuangan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Sumber Data	Dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi dan dokumen sebagai evidence yang harus diupload pada aplikasi IPKD)
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi IPKD dari BKSDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

2. Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (D2)

Nama Indikator	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
Definisi	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas penganggaran belanja dalam APBD, yang mana penganggaran belanja harus memenuhi beberapa amanat perundang-undangan (<i>mandatory spending</i>) dengan indikator yang digunakan adalah : a. Pengalokasian belanja untuk Pendidikan minimal 20% b. Pengalokasian belanja pegawai paling tinggi 30% c. Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% d. Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan	$D2 = \frac{\text{Jumlah nilai indikator pengalokasian belanja}}{\text{Jumlah indikator}} \times \text{Bobot}$ atau $D2 = \frac{(D2.1+D2.2+D2.3+D2.4)}{4} \times 20$ Keterangan indikator: D2.1 = Pengalokasian belanja untuk Pendidikan minimal 20% dari Total belanja APBD D2.2 = Pengalokasian belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD D2.3 = Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa D2.4 = Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan. Jumlah bobot pada dimensi pengalokasian belanja dalam APBD adalah 20.
Interpretasi	Nilai indeks pengalokasian belanja dalam APBD dengan hasil lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan anggaran belanja dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan (<i>mandatory spending</i>).
Sumber Data	Laporan <i>Mandatory Spending</i> dan Laporan SPM
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi dan dokumen sebagai evidence yang harus diupload pada aplikasi IPKD)
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi IPKD dari BKSDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (D3)

Nama Indikator	Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Definisi	Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengukuran atas ketepatan waktu mempublikasikan dan keteraksesan terhadap data dan informasi yang tercantum dalam dokumen pengelolaan keuangan daerah.
Rumus Perhitungan	$D3 = \frac{\text{Jumlah nilai indikator transparansi}}{\text{jumlah indikator}} \times \text{Bobot}$ atau $D3 = \frac{(D3.1+D3.2)}{2} \times 15$

	Keterangan indikator: D3.1 = Ketepatan waktu publikasi dokumen pengelolaan keuangan daerah D3.2 = Keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan daerah Jumlah bobot pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah 15
Interpretasi	Nilai hasil monev yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sumber Data	1. RPJMD 2. RKPD 3. RENJA-PD 4. KUA 5. PPAS 6. Perda APBD 7. Perkada APBD 8. Perda APBD-Perubahan 8. LK BUMD 9. LAKIP 10. LKPD 12. Perda Jawaban Pertanggung Pelaksanaan APBD 13. Opini BPK 14. Daftar RUP 15. SK- PPKD 16. DPA – SKPD
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi dan dokumen sebagai evidence yang harus diupload pada aplikasi IPKD)
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi IPKD dari BKSDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

4. Nilai Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (D4)

Nama Indikator	Nilai Penyerapan Anggaran Belanja Daerah
Definisi	Nilai Penyerapan Anggaran Belanja Daerah adalah salah satu tahapan dari siklus APBD yang mulai dari perencanaan anggaran, persetujuan Bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran merupakan kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran belanja daerah diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya, pengukuran atas ketepatan waktu mempublikasikan dan keteraksesan terhadap data dan informasi yang tercantum dalam dokumen pengelolaan keuangan daerah.
Rumus Perhitungan	D4 = $\frac{\text{Jumlah nilai indikator penyerapan anggaran}}{\text{jumlah indikator}}$ x Bobot atau D4 = $\frac{(D4.1+D4.2+D4.3)}{3} \times 20$

	Keterangan indikator: D4.1 = Belanja operasional D4.2 = Belanja modal D4.3 = Belanja transfer Jumlah bobot pada dimensi penyerapan anggaran belanja daerah adalah 20
Interpretasi	Nilai penyerapan anggaran yang tinggi (diatas 80%) menunjukkan semakin baik capaian kinerja anggaran belanja daerah .
Sumber Data	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi, telah diaudit dan dokumen sebagai evidance yang harus diupload pada aplikasi IPKD)
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi IPKD dari BKSDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

5. Nilai Kondisi Keuangan Daerah (D5)

Nama Indikator	Nilai Kondisi Keuangan Daerah
Definisi	Nilai Kondisi Daerah adalah suatu nilai yang mengukur kemampuan keuangan suatu pemerintahah daerah untuk memenuhi kewajiban (kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka Panjang) mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efektif dan efisien.
Rumus Perhitungan	$D5 = \frac{\text{Jumlah nilai indikator kondisi keuangan daerah}}{\text{jumlah indikator}} \times \text{Bobot}$ atau $D5 = \frac{(D5.1+D5.2+D5.3+D5.4+D5.5) \times 20}{5}$ Keterangan indikator: D5.1 = Kemandirian keuangan D5.2 = Fleksibilitas keuangan D5.3 = Solvabilitas operasional D5.4 = Solvabilitas jangka pendek D5.5 = Solvabilitas jangka panjang Jumlah bobot pada dimensi kondisi keuangan daerah daerah adalah 20
Interpretasi	Nilai penyerapan anggaran yang tinggi (diatas 80%) menunjukkan semakin baik capaian kinerja anggaran belanja daerah .

Sumber Data	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi, telah diaudit dan dokumen sebagai evidance yang harus diupload pada aplikasi IPKD)
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi IPKD dari BKSDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (D6)

Nama Indikator	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD
Definisi	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD adalah pernyataan dBadan Pemeriksa Keuangan atas penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern.
Rumus Perhitungan	D6 = Jumlah skor indikator opini BPK atas LKPD x Bobot Keterangan skor indikator: a. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP sebanyak 3 kali dalam 3 tahun terakhir berturut-turut diberikan skor 1 b. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP sebanyak 2 kali dalam 3 tahun terakhir berturut-turut diberikan skor 0,667 c. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP sebanyak 1 kali dalam 3 tahun terakhir berturut-turut diberikan skor 0,334 Jumlah bobot pada dimensi kondisi keuangan daerah daerah adalah 10
Interpretasi	Penyataan WTP atas LKPD menunjukan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang andal .
Sumber Data	Pernyataan WTP dari BPK atas LKPD
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi, hasil audit dan dokumen sebagai evidance yang harus diupload pada aplikasi IPKD)
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi IPKD dari BKSDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

7. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Aset Daerah
Definisi	Indeks Pengelolaan Aset Daerah adalah indicator untuk menilai kualitas dan kinerja pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	$\text{IPA} = \frac{\text{Jumlah nilai indikator IPA}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$ Keterangan nilai indikator: - Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif - Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan - Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif - Administrasi BMD yang andal
Interpretasi	Nilai IPA yang tinggi menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel .
Sumber Data	Laporan Barang Milik Daerah, LHP BPK, Neraca
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi)
Metode Pengukuran	Pengukuran dilakukan secara mandiri (<i>self assessment</i>)

8. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Definisi	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dibandingkan periode sebelumnya atau target yang ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Peningkatan PAD} = \frac{\text{realisasi PAD Thn N} - \text{realisasi PAD Thn N-1}}{\text{realisasi PAD tahun N-1}} \times 100 \%$ atau $\text{Capaian PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$
Interpretasi	Peningkatan PAD yang tinggi menunjukkan semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pengelolaan PAD .
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran / Laporan realisasi PAD

Frekuensi	Tahunan (monitoring triwulan/bulanan)
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi dan diaudit)
Metode Pengukuran	Pengukuran dilakukan secara mandiri (<i>self assessment</i>)

9. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Definisi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan nilai Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama yang menggambarkan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100 \%$
Interpretasi	Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang tinggi menunjukkan semakin meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi potensi pajak .
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data PDRB pada tahun berjalan dari BPS
Frekuensi	Tahunan (monitoring semesteran/triwulan)
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi dan diaudit)
Metode Pengukuran	Pengukuran dilakukan secara mandiri (<i>self assessment</i>)

10.Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai SAKIP Perangkat Daerah																											
Definisi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.																											
Rumus Perhitungan	SAKIP dihitung dari beberapa komponen berikut:																											
	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan (20%)	Sub Komponen 2 Kualitas (30%)	Sub Komponen 3 Pemanfaatan (50%)	Total Bobot																							
	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																							
	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																							
	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																							
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																							
	Komponen dan sub komponen dinilai berdasarkan 80 kriteria pencapaian. Setiap kriteria yang dinilai membutuhkan <i>professional judgements</i> dari evaluator yang terdiri dari tim evaluasi AKIP.																											
	Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP:																											
	<table><tr><td>Huruf</td><td>Nilai</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>AA</td><td>> 90 - 100</td><td>Sangat memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>> 80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>> 70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>> 60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>> 50 - 60</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>C</td><td>> 30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>≥ 0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>					Huruf	Nilai	Kategori	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan	A	> 80 - 90	Memuaskan	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	B	> 60 - 70	Baik	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)	C	> 30 - 50	Kurang	D	≥ 0 - 30
Huruf	Nilai	Kategori																										
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan																										
A	> 80 - 90	Memuaskan																										
BB	> 70 - 80	Sangat Baik																										
B	> 60 - 70	Baik																										
CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)																										
C	> 30 - 50	Kurang																										
D	≥ 0 - 30	Sangat Kurang																										
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tinggi akuntabilitas kinerja pemerintah																											
Sumber Data	LKjIP, PK, DPA, IKU, Renstra, Renja																											
Frekuensi	Tahunan																											
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi)																											
Metode Pengukuran	Pengukuran dilakukan menggunakan e-sakip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																											

11.Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah

Nama Indikator	Indeks IPP Perangkat Daerah																														
Definisi	Indeks IPP Perangkat Daerah untuk Mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.																														
Rumus Perhitungan	Indeks yang dihasilkan merupakan komposit indikator IPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip yang digunakan yaitu Keadilan (<i>Fairness</i>), Partisipasi (<i>Participation</i>), Akuntabilitas (<i>Accountability</i>), Transparansi (<i>transparency</i>), Berdayaguna (<i>useful</i>), dan Aksesibilitas (<i>accessibility</i>). Penilaian dilakukan melalui pengisian Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan) dengan rumus berikut: 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3} \right) \times bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan indeks $nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$ Kategori Perhitungan Indeks Pelayanan Publik: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, maka penyelenggaraan pelayanan publik semakin mendekati standar pelayanan yang ditetapkan perundang-undangan.																														
Sumber Data	Hasil Survei																														
Frekuensi	Tahunan																														
Tingkat Validitas Data	Tinggi (berbasis dokumen resmi)																														
Metode Pengukuran	Pengukuran dilakukan menggunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																														

12.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Nama Indikator	Indeks IKM Perangkat Daerah																							
Definisi	Indeks IKM Perangkat Daerah Pengukuran kinerja pelayanan publik dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat yang berpedoman kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.																							
Rumus Perhitungan	Survei dilakukan kepada beberapa Perangkat Daerah yang ditentukan oleh KemenPAN RB. Hasil pelaksanaan survei kepuasan berupa indeks dengan interval nilai sebagai berikut : <table><tr><th>Interval</th><th>Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2,60 - 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>				Interval	Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
Interval	Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																					
2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																					
3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																					
3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																					
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah semakin baik, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat.																							
Sumber Data	Hasil Survei																							
Frekuensi	Tahunan dan triwulan																							
Tingkat Validitas Data	Sedang																							
Metode Pengukuran	Pengukuran dilakukan oleh Kemenpan RB dan Bagian Ornaisasi Sekretariat Daerah dimana mulai tahun 2025, IKM seluruh perangkat daerah dapat diakses melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada alamat website kepo.solokkota.go.id . Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah menetapkan Tim Pengelola Aplikasi SKM yang terdiri dari semua perangkat daerah. Pada menu e-SKM dapat dilihat hasil survei kepuasan masyarakat seluruh perangkat daerah per triwulan.																							

C. Indikator Kinerja Kunci

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD

Nama Indikator	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD
Definisi	Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Anggaran belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai yang lebih TINGGI menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat (TKD) untuk membiayai belanja pegawai non-guru (seperti honorarium, tunjangan PNS daerah, dll) semakin besar. Hal ini dapat mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang terbatas untuk membiayai kewajiban kepegawaiannya secara mandiri. - Nilai yang lebih RENDAH menunjukkan bahwa belanja pegawai non-guru lebih banyak dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan daerah lainnya, yang dapat mengindikasikan kemandirian fiskal daerah yang lebih baik.
Sumber Data	LRA
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi SiLPPD Kemendagri

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah yang diterima oleh suatu daerah (baik provinsi, kabupaten, atau kota). Rasio ini menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam membiayai pengeluarannya tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau transfer lainnya.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Keterangan: - Realisasi PAD: Jumlah aktual penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Komponen PAD meliputi: • Pajak Daerah

	• Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Lain-lain PAD yang Sah - Realisasi Pendapatan Daerah: Jumlah aktual seluruh penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, yang bersumber dari: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Interpretasi	- Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik. Artinya, daerah mampu membiayai sebagian besar kegiatannya dari sumber daya keuangan sendiri, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat lebih rendah. - Nilai yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat.
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi SiLPPD Kemendagri

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Nama Indikator	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Definisi	Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar adalah pelaksanaan pengeluaran anggaran untuk mendanai pelayanan dasar masyarakat. Pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan bencana.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun } N}{\text{Alokasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun } N} \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah tepat sasaran dan eksekusi program/kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif. - Nilai rendah (jauh di bawah 100%) mengindikasikan adanya hambatan serius dalam pelaksanaan program. Realisasi yang rendah berpotensi mengganggu kualitas dan cakupan pelayanan dasar yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi SiLPPD Kemendagri

4. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Nama Indikator	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Definisi	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
Rumus Perhitungan	$= \frac{(\text{Nilai Aset Tetap Tahun } N) - (\text{Nilai Aset Tetap Tahun } N - 1)}{(\text{Nilai Aset Tetap Tahun } N)} \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai Positif Tinggi (>10%) : Mengindikasikan ekspansi atau pengembangan aset yang signifikan, yang dapat mendukung peningkatan kapasitas layanan atau produksi. Namun, perlu dilihat apakah penambahan sebanding dengan peningkatan outcome. - Nilai Positif Rendah (0-10%) : Menunjukkan pertumbuhan aset yang stabil, namun mungkin perlu evaluasi apakah pertumbuhan tersebut sudah optimal untuk mendukung perkembangan organisasi/daerah. - Nilai Negatif : Mengindikasikan penyusutan atau pelepasan aset tanpa adanya penggantian yang memadai, yang berpotensi mempengaruhi kemampuan operasional jangka panjang. - Nilai 0% : Menunjukkan tidak ada perubahan dalam portofolio aset tetap, yang dapat mencerminkan stagnasi dalam pengembangan aset.
Sumber Data	Neraca
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi SiLPPD Kemendagri

5. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Nama Indikator	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Definisi	Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan,

	dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah..
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\left(\text{Total belanja APBD diluar belanja bagi hasil} \right) \text{ dan/atau transfer kepada daerah}} \times 100\%$ -
Interpretasi	- Tinggi : Menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur publik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat - Sedang : Mengindikasikan perhatian cukup terhadap pengembangan infrastruktur, namun masih perlu peningkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat - Rendah : Menandakan prioritas yang kurang pada pengembangan infrastruktur publik yang dapat berpotensi menghambat peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi SiLPPD Kemendagri

6. Persentase Penurunan SILPA

Nama Indikator	Persentase Penurunan SILPA
Definisi	Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) mengukur besarnya pengurangan SILPA tahun berjalan dibandingkan dengan SILPA tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan daerah dan pembiayaan dibandingkan dengan realisasi belanja dan pembiayaan, yang mencerminkan efisiensi penyerapan anggaran dan optimalisasi penggunaan keuangan daerah.
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{(\text{Nilai SILPA Tahun } N) - (\text{Nilai SILPA Tahun } N - 1)}{(\text{Nilai SILPA Tahun } N - 1)} \times 100\%$
Interpretasi	Penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran menggunakan aplikasi SiLPPD Kemendagri

D. Indikator Kinerja Program

1. Persentase Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif

Nama Indikator	Persentase Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif
Definisi	Persentase Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif merupakan persentase pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari 2 indikator sebagai berikut: 1. Nilai Temuan BPK terhadap nilai BMD 2. Realisasi Pendapatan dari pemanfaatan BMD terhadap target yang ditetapkan
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Jumlah nilai Indikator}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$ Keterangan Indikator : 1. Nilai Temuan BPK terhadap nilai BMD $= \frac{\text{Nilai temuan BPK atas LKPD}}{\text{nilai BMD}} \times 100\%$ Nilai BMD = nilai Persediaan + aset tetap+ aset tidak berwujud pada Laporan BMD 2. Realisasi Pendapatan dari pemanfaatan BMD terhadap target yang ditetapkan $= \frac{\text{Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD}}{\text{Target Penerimaan atas Pemanfaatan BMD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi hasil pengukuran indicator menunjukan semakin berkualitas (akuntabel dan produktif) pengelolaan BMD dalam memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan bagi daerah
Sumber Data	Laporan BMD, LHP BPK, Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran Mandiri ((self assessment)

2. Persentase Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan

Nama Indikator	Persentase Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan
Definisi	Persentase Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan persentase pengelolaan BMD yang mengukur tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan dan objek BMD yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan meliputi perencanaan, pengelolaan dan pelaporan BMD yang terdiri dari 3 indikator pengukuran sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dalam penetapan RKBMD 2. Ketepatan waktu dalam menyusun laporan BMD sesuai dengan peraturan 3. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Jumlah nilai Indikator}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$ Keterangan Indikator : 1. Ketepatan waktu dalam penetapan RKBMD $= \frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ 2. Ketepatan waktu dalam menyusun laporan BMD sesuai dengan peraturan $= \frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ 3. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku $= \frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD tepat waktu sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi hasil pengukuran indicator menunjukan semakin tertib dalam pengelolaan BMD dalam menghasilkan laporan pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Sumber Data	Laporan BMD, RKBMD, BI dan KIR
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran Mandiri ((self assessment)

3. Persentase Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif

Nama Indikator	Persentase Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif
Definisi	Persentase Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif merupakan persentase pengelolaan BMD yang mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Aset Daerah terhadap pengelolaan BMD. Indikator pengukurannya adalah persentase tindak lanjut pengelolaan BMD (pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD Aset Rusak Berat dan KDP)
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Jumlah BMD atas pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang telah dikeluarkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi hasil pengukuran indikator menunjukan telah pengawasan dan pengendalian BMD telah berjalan efektif
Sumber Data	Laporan Pemanfaatan, Pemusnahan, Pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Sedang
Metode Pengukuran	Pengukuran Mandiri (<i>self assessment</i>)

4. Persentase Administrasi BMD yang Andal

Nama Indikator	Persentase Administrasi BMD yang Andal
Definisi	Persentase Administrasi BMD yang Andal merupakan persentase pengelolaan BMD yang mengukur tingkat keandalan administrasi pengelolaan BMD yang tertib, muktakhir dan dapat ditertanggungjawabkan. Ada 2 indikator pengukuran administrasi BMD yang andal yaitu : 1. Persentase Tanah yang bersertifikat 2. Kesesuaian pelaporan BMD dengan Fisik BMD
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Jumlah nilai Indikator}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$ Keterangan Indikator : 1. Persentase Tanah yang bersertifikat $= \frac{\text{Jumlah tanah yang bersertifikat}}{\text{Jumlah persil tanah keseluruhan}} \times 100\%$ 2. Kesesuaian pelaporan BMD dengan Fisik BMD

	$= \frac{\text{Laporan Inventaris BMD}}{\text{Jumlah Fisik BMD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi hasil pengukuran indicator menunjukan telah pengawasan dan pengendalian BMD telah berjalan efektif
Sumber Data	Buku Inventaris BMD, Sertifikat Tanah, KIB A
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Sedang
Metode Pengukuran	Pengukuran Mandiri ((self assessment)

5. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah
Definisi	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah merupakan persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dalam mengukur efektifitas pengelolaan, pengawasan dan instensifikasi pajak daerah.
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun N} - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun N - 1}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun N - 1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi hasil pengukuran indicator menunjukan peningkatan kemampuan daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah secara optimal, efektif dan berkelanjutan
Sumber Data	LRA dan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran Mandiri ((self assessment)

6. Persentase Jumlah OPD Inner yang Realisasi Retribusi Daerah ≥ 100%

Nama Indikator	Persentase Jumlah OPD Inner yang Realisasi Retribusi Daerah ≥ 100%
Definisi	Persentase Jumlah OPD Inner yang Realisasi Retribusi Daerah ≥ 100% merupakan persentase yang mengukur keberhasilan atas pembinaan pengelolaan retribusi daerah terhadap OPD Inner yang diukur dengan melihat berapa persentase OPD Inner yang realisasi penerimaan retribusi daerah minimal 100%.

Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Jumlah OPD innner yang realisasinya} \geq 100\%}{\text{Jumlah OPD Inner Keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi hasil pengukuran indicator menunjukan semakin tinggi penerimaan retribusi daerah
Sumber Data	LRA dan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Frekuensi	Tahunan
Tingkat Validitas Data	Tinggi
Metode Pengukuran	Pengukuran Mandiri (<i>self assessment</i>)